



**INFORMASI HUMAS
PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2026**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN**
Jalan Semila Jati II Dusun Tonja, Desa Gubung Kabupaten Tabanan
TLP.(0361) 811171
2026

KATA PENGANTAR

Atas asung kerta waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) kami bersyukur dapat menyusun Informasi Humas Penanggulangan Bencana Periode Triwulan I 2026 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyusunan laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Laporan semesteran ini memberikan gambaran kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur Pusdalops, TRC, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga laporan ini selesai tepat pada waktunya.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) sehingga masyarakat di rawan bencana semakin tagguh bencana.



Tabanan, 2 April 2026

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E.,M.M

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan	2
II. GAMBARAN UMUM BPBD	3
2.1 Kelembagaan BPBD.....	3
2.2 Sumber Daya Aparatur	3
2.3 Sarana dan Prasarana	3
III. KAJIAN RISIKO BENCANA	4
3.1 Kondisi Administratif.....	4
3.2 Kondisi Geografis Wilayah	4
3.3 Pemetaan Risiko Bencana.....	5
3.4 Rencana Aksi	6
IV. PENANGGULANGAN BENCANA.....	7
4.1 Bencana Cuaca Esktrim.....	7
4.2 Bencana Tanah Longsor	7
4.3 Bencana Banjir	7
4.4 Bencana Gempa Bumi.....	8
4.5 Bencana Lainnya	8
4.6 Penyaluran Logistik.....	8
4.7 Publikasi di Medsos.....	9
4.8 Layanan Pengaduan.....	9
BAB V PENUTUP	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran	10

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penanggulangan bencana merupakan kewajiban semua komponen bangsa. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2026 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*).

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Untuk mewujudkan amanah tujuan Renstra BPBD Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim, maka aparatur BPBD melalui rencana kerja tahunan telah merumuskan rencan kerja penanggulangan bencana yang sinergis dengan instansi lain, karena bencana adalah tanggungjawab semua komponen bangsa.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program prioritas maka secara berkala dilakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam penanggulangan bencana dan terpublikasikan ke publik.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Urusan Tugas Jabatan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
8. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/947/01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Koordinasi Pelayanan Kebencanaan.

1.3. Tujuan.

1. Memberikan gambaran umum risiko bencana di wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Melaporkan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan.
3. Memberikan informasi kinerja publikasi kegiatan penanggulangan bencana mendukung tujuan Renstra BPBD yaitu terwujudnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim.

II. GAMBARAN UMUM BPBD

2.1 Kelembagaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 dengan klasifikasi B dengan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Kepala Sekretariat, 3 Kepala Seksi, dan Staf. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 berubah struktur organisasinya menjadi klasifikasi A dengan susunan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Sekretaris Badan, 1 Kasubag Umum dan Keuangan, 3 Kepala Bidang, Fungsional Teknis, dan Fungsional Umum. Kelembagaan BPBD di Kabupaten Tabanan memerlukan inovasi dan kreasi dalam membangun kinerja yang harus sinergis dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah didukung oleh pegawai berikut ini.

No	Uraian	Jumlah pegawai	Keterangan
A	PNS		
1	Struktural	6 orang	Eselon IIb, IIIb, IVa
2	Fungsional Teknis	0 orang	Belum ada
3	Fungsional Umum	8 orang	Pelaksana di sekretariat dan bidang
B	PPPK		
1	PPPK penuh waktu	21 orang	Staf lapangan dan operator
2	PPPK paruh waktu	42 orang	Staf layanan

2.3 Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan layanan kehumasan kebencanaan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang asetnya ada milik daerah dan ada milik instansi pusat dan provinsi sebagai berikut :

- a. Sarana sirine peringatan dini yang merupakan aset BPBD Provinsi yang ditempatkan di Desa Belalang Kecamatan Kediri
- b. Sarana informasi gempa bumi dari BMKG yang ditempatkan di kantor BPBD
- c. Sarana radio yang merupakan aset BPBD Provinsi Bali yang ditempatkan di kantor
- d. Pemancar HT kerjasama dengan RAPI
- e. Call centre tanggap bencana dengan nomor 0361-811171
- f. WA Pusdalops dalam respon time informasi bencana
- g. Ruang pelayanan publik dan ruang pengaduan kebencanaan

III. KAJIAN RISIKO BENCANA

3.1 Kondisi Administratif

Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,33 Km² atau sekitar 14,90% dari luas Provinsi Bali. Secara administratif terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 133 (seratus tiga puluh tiga) desa, 344 desa adat, 816 banjar adat. Wilayah Kabupaten Tabanan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Letak wilayah Kabupaten Tabanan cukup strategis karena berdekatan dengan ibukota provinsi dengan jarak 25 Km. Secara geografis berada pada posisi 8^o14'30"-8^o30'07"LS d, 114^o54'52 – 115^o12'57".

3.2 Kondisi Geografis Wilayah

Secara geografis berada pada posisi 8^o14'30"- 8^o30'07"LS d, 114^o54'52 – 115^o12'57".

a. Kondisi tutupan lahan

Kabupaten Tabanan didominasi oleh tutupan / penggunaan lahan pertanian dan perkebunan. Tutupan lahan hutan banyak ditemui di bagian utara yang memiliki ketinggian lebih dari 500 mdpl, dengan topografi / kelerengan 3-15%.

b. Kondisi bentuk lahan

Kabupaten Tabanan memiliki bentuk asal proses vulkanis, yang berawal dari gunung vulkanik pirba di sebelah utara, tepatnya di pegunungan catur. Bentuk vulkanik ini dalam prosesnya membentuk morfometri dan morfosekuen yang beraneka ragam, mulai dari sisi utara sampai bagian selatan wilayah Kabupaten Tabanan. Tekstur tanah sebagian besar memiliki tekstur geluh-pasiran, dimana tekstur tanah ini sangat cocok ditanami tanaman pertanian maupun perkebunan.

3.3 Pemetaan Risiko Bencana

Risiko bencana dapat diuraikan sebagai fungsi dari bahaya (*hazard*) dan kerawanan (*vulnerability*), yang dapat dikombinasikan dengan kemampuan untuk mengatasi bencana (*coping capacity*).

Ancaman bencana di Kabupaten Tabanan diidentifikasi ada 12 (dua belas) kelompok ancaman : 1). Bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, gunungapi, tanah longsor, 2). Bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, 3). Bencana

antropogenik berupa epidemik atau wabah penyakit dan kegagalan teknologi/kecelakaan industri. Seluruh potensi bencana dapat menimbulkan dampak korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

a. Bahaya cuaca sekstrim

Cuaca ekstrim dalam hal ini adalah angin kencang merupakan angin dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara agraris balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu system cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi).

b. Bahaya banjir

Daerah rawan banjir merupakan daerah yang sering atau berpotensi terjadi banjir berdasarkan besaran frekwensi kejadian atau berdasarkan parameter fisik yang berhubungan dengan karakteristik daerah banjir (*flood plain*) di suatu wilayah. Kabupaten Tabanan dalam pemetaan rawan banjir dengan menggunakan dua pendekatan yakni : 1). Mengidentifikasi daerah genangan banjir dengan pendekatan geomorfologi suatu wilayah sungai yang dapat diklarifikasi dengan ketersediaan data area dampak yang pernah terjadi, 2). Mengestimasi ketinggian genangan berdasarkan ketinggian elevasi (jarak vertikal) di atas permukaan sungai di dalam area potensi genangan.

c. Bahaya tsunami

Tsunami merupakan fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengaibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ada 12 (dua belas) desa pesisir yang telah diidentifikasi rawan bahaya tsunami yang merhadapan langsung dengan lautan / samudra hindia.

d. Bahaya gerakan tanah lonsor

Tanah lonsor merupakan suatu proses perpindahan massa tanah atau bebatuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari masa yang mantap, karena pengaruh gravitasi dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.

e. Bahaya gempa bumi

Gempa bumi merupakan ancaman berupa intensitas guncangan di permukaan tanah pada saat terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang dapat menimbulkan korban. BPBD Kabupaten Tabanan telah memiliki Warning Receiver System sebagai alat pendeteksi informasi gempa di seluruh Indonesia. Alat ini merupakan milik BMKG yang ditempatkan di BPBD Tabanan dalam informasi gempa.

IV. PENANGGULANGAN BENCANA

4.1 Bencana Cuaca Ekstrim

Wilayah Kabupaten Tabanan sangat rawan terhadap cuaca ekstrim yang sudah dituangkan dalam dokumen Kajian Risiko Bencana. Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 tahun 2012 dinyatakan bahaya cuaca ekstrim dalam hal ini angin kencang dapat disusun dengan metode skoring terhadap tiga parameter yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan. Bencana akibat angin kencang berupa pohon tumbang yang terjadi di jalan raya, di pemukiman penduduk, dan fasilitas umum. Adapun bencana pohon tumbang yang sudah ditangani oleh BPBD seperti berikut ini.

Bulan	Kejadian pohon tumbang (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	17	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Pebruari	21	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Maret	22	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Jumlah	60		

Sumber : Bidang KL, 2026

4.2 Bencana Tanah Longsor

Penilaian bahaya tanah longsor dilakukan dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak kegagalan lereng, menghitung profibalitas kejadian, dan memperkirakan besarnya (area, volume, laju pergerakan dari peristiwa tersebut). Wilayah Kabupaten Tabanan sangat rawat pergerakan tanah longsor. Adapun keejadian bencana tanah longsor yang terjadi dan ditangani oleh Tim BPBD berkolaborasi dengan instansi terkait disajikan seperti berikut ini.

Bulan	Kejadian tanah longsor (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	16	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Pebruari	3	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Maret	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Jumlah	19		

Sumber : Bidang KL, 2026

4.3 Bencana Banjir

Daerah rawan banjir di Kabupaten Tabanan telah diidentifikasi dalam dokumen Kajian Risiko Bencana. Daerah yang sering atau berpotensi banjir terus disosialisasikan kepada aparat desa sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. Adapun kejadian banjir skala kecil yang disajikan berikut ini.

Bulan	Kejadian banjir (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Pebruari	1	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Maret	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Jumlah	1		

Sumber : Bidang KL, 2026

4.4 Bencana Gempa Bumi

Wilayah Kabupaten Tabanan memiliki potensi rawan gempa bumi, sehingga sosialisasi kesiapsiagaan terus dilakukan kepada siswa dan masyarakat umum dengan terus bekerjasama dengan BMKG. Kantor BPBD telah tersedia altimeter yang menginformasikan titik gempa di seluruh Indonesia. Belum ada gempa bumi berdampak kerugian Januari sd Maret 2026 disajikan seperti berikut ini.

Bulan	Kejadian gempa bumi (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	0	0	Tidak ada laporan masyarakat terdampak gempa/ korban jiwa
Pebruari	0	0	-
Maret	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Sumber : Bidang KL, 2026

4.5 Bencana Lainnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelayanan tanggap bencana selain menangani dampak kebencanaan diatas juga sigap dalam pelayanan kebencanaan bekerjasama dengan instansi terkait (Kepolisian, TNI, SAR, Satpol PP, Kecamatan, Desa, Tagana, Relawan, masyarakat). Periode Januari sd Maret 2026 ada ... orang korban meninggal dan sudah dievakuasi akibat terseret arus dan meninggal karena kecelakaan bencana. Adapun datanya disajikan seperti berikut ini.

Bulan	Orang hanyut	Orang tersesat	Bangunan masy.rusak	Evakuasi korban mati	Bencana Lainnya
Januari	4	4	16	3	0
Pebruari	0	0	6	1	0
Maret	0	0	0	0	6
Jumlah	4	4	22	3	6

Sumber : Bidang Kedaruratan dan Logistik, 2026

4.6 Penyaluran Logistik

BPBD Kabupaten Tabanan telah memberikan pelayanan penyaluran logistik kepada masyarakat terdampak bencana di 9 titik bencana. Adapun lokasi penyaluran logistik seperti berikut ini.

Bulan	Penyaluran logistik			Jumlah
	Jumlah paket	Lokasi terdampak bencana	Bencana yang menimpa	
Januari	3	Br. Kayu Puring, Br. Kubu, Br Anggasari Kelod	Longsor	3
Pebruari	7	Br Cepaka, Br Surodadi, Br Anggasari Kelod, Br Padangan Kelod, Br Langudu, Br Kekeran	Kebakaran Longsor	7
Maret	3	Br Manikyang, Br Bongan Kauh, Br Kalaci	Longsor	3
Jumlah	13			13

Sumber : Bidang Kedaruratan dan Logistik, 2026

4.7 Publikasi di Medsos

Kegiatan publikasi kinerja layanan kebencanaan dibawah koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan kesehariannya dilaksanakan oleh Tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yaitu :

- a. Tim Data dan Informasi menyajikan data dan informasi kejadian dan penanganan bencana yang terekap di laporan harian dan sistema informasi kebencanaan (SIK)
- b. Tim Analisa Situasi dan Potensi Bencana menelaah dan meneruskan informasi prakiraan cuaca dari BMKG karena semua BPBD se-Bali terkoordinir dalam WA BMKG Bali Siaga Bencana.
- c. Tim Komunikasi terdiri atas :
 - Tim radio rountable melaporkan situasi kebencanaan dalam apel perwira setiap jam 09.00 dan jam 21.00 WITA kepada UPTD Pengendalian Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Bali
 - Tim mesos (FB dan IG) mempublikasikan berita / informasi kegiatan prabencana, tanggap bencana, pascabencana, dan kebijakan daerah). Untuk bulan Januari terpublikasi 39 fostingan, bulan Pebruai 50 Postingan, dan bulan maret 30 postingan
 - Tim call center menerima permohonan kebencanaan dan ditindaklanjuti oleh Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat.

4.8 Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan kebencanaan dibawah koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan kesehariannya dilaksanakan oleh Tim Pengaduan. Adapun kanal pengaduan yang dibula kepada masyarakat umum yaitu :

- Call center 0361-811171

-WA Pusdalops

-SP4N LAPOR

Periode Januari pengaduan nihil, bulan Pebruari nihil, dan bulan Maret nihil, karena Tim BPBD selalu respon time dalam pelayanan kebencanaan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah merumuskan dan menyusun rencana aksi penanggulangan bencana sesuai dokumen Kajian Risiko bencana, Renstra BPBD dan Renja tahun 2026 sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana.
- b. Kegiatan tanggap bencana dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan TNI, Polri, SAR, Tagana, Relawan, Forum PRB, masyarakat sehingga setiap kejadian bencana dapat ditangani sesuai amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- c. Tanggap bencana di wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2026 telah ditangani 120 titik kejadian seperti tanah longsor, cuaca ekstim (pohon tumbang), banjir, gempa bumi, dan bencana lainnya (orang tersesat pendakian, orang hilang, orang hanyut, rumah dan fasilitas umum roboh akibat cuaca ekstim) dengan 3 korban meninggal yang sudah dievakuasi akibat terseret arus dan kecelakaan akibat bencana
- d. Dukungan logistik untuk bantuan kepada korban bencana telah dapat disalurkan 13 paket sesuai yang membutuhkan dengan administrasi yang baik.
- e. Evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dan berkala (Pusdalops, TRC, Bidang Kedaruratan dan Logistik, PPID Pelaksana, Pimpinan BPBD) dan disampaikan ke instansi terkait di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.

5.2 Saran

- a. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan pulik kebencanaan, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas dan penganggaran untuk mendukung rencana aksi penanggulangan bencana.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sehingga upaya penurunan risiko bencana dan ketahanan daerah dapat terintegrasi untuk ketangguhan daerah.



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

[Handwritten Signature]
Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M.
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran

DATA HUMAS PENANGGULANGAN BENCANA

Periode : Januari sd Maret 2026

a. Penangan Bencana

Kecamatan	Pohon tumbang	Tanah longsor	Banjir	Gempa bumi	Tsunami	Bencana lainnya	Evakuasi korban mati
Kediri	7	1	1			5	
Tabanan	17	1				8	2
Kerambitan	7					4	1
Seltim	3					1	
Selemadeg	5					2	
Selbar	1					1	
Marga	8	2				2	
Baturiti	1					1	
Penebel	5	2				2	
Pupuan	1	13				2	
Jumlah	60	19	1	0	0	28	3

b. Publikasi berita / informasi

Bulan	Jumlah berita terpublikasi di FB dan IG	Keterangan
Januari	39 postingan	Daftar Informasi Publik
Pebruari	50 postingan	Daftar Informasi Publik
Maret	30 postingan	Daftar Informasi Publik

c. Pengaduan Masyarakat

Bulan	Pengaduan masyarakat di kanal pengaduan	Jumlah pengaduan
Januari	SP4N LAPOR, call center, WA Pusdalops	Nihil
Pebruari	SP4N LAPOR, call center, WA Pusdalops	Nihil
Maret	SP4N LAPOR, call center, WA Pusdalops	Nihil

Sekretaris BPBD

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana


Agung Raka Bhakta Wirawan, S.Pi, MMA.

NIP. 19760608 200212 1 009